

**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow**

**Sesilia Kristina Kusen¹
Novie R. Pioh²
Donald K. Monintja³**

ABSTRAK

Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah akan makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan. Penelitian ini berlokasi di desa Pinomobatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mondondow. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan musrenbangdes belum maksimal di desa Pinonobatan kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang mongondow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat sudah maksimal namun perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonomi dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Perkembangan masyarakat dalam berpartisipasi terkendala oleh pekerjaan yang dimiliki, sehingga dalam perencanaan pembangunan, partisipasi hanya akan terwujud apabila ada instruksi dari pemerintah desa untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan apabila ada proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan, seperti dengan mengadakan kegiatan pembangunan jalan dan gotong royong. Sementara, pemerintah desa tidak berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan serta diskusi antara pemerintah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat Desa Pinonobatuan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan

di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia.

Masyarakat desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang (Musyawarah perencanaan dan pembangunan), khusus tingkat desa karena Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan desa. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang dialami di Desa Pinonobatuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa karena masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat masih belum puas dan percaya akan pelaksanaan Musrenbang, mereka menganggap bahwa Musrenbang hanya janji belaka. Itu terjadi disebabkan karena musrenbang tidak transparan terhadap masyarakat desa dan karena itu pelaksanaan pembangunan jalan belum bisa terwujud. Hal ini terjadi pada masyarakat di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana wujud komunikasi partisipasi masyarakat pada Musrenbang di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurut salah satu peneliti terdahulu wawan setiawan, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa.

Diantaranya partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Masalah partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. Dalam penelitian ini perbedaan antara peneliti terdahulu yakni mengkaji masalah partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. Hambatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrembang yaitu kurangnya sosialisasi akan adanya kegiatan musrenbang desa serta kurangnya kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan kepala desa serta masyarakat merasa terwakili akan kehadiran ketua RT maupun RW. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Konsep Masyarakat

Definisi dan pengertian mengenai masyarakat telah banyak dikemukakan oleh para antropologi dan sosiologi. Menurut Robert Mac Iver dalam Budiardjo (2002:33), masyarakat adalah "suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan (Society means a system of ordered relations)". Menurut perumusan Harold J. Laski dari London School Of Economics and Political Science dalam Budiardjo (2002:34) maka masyarakat adalah "sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (A Society is a group of human beings living together and working together for a satisfaction of their mutual wants)". Beberapa pengertian tentang masyarakat tersebut dikemukakan dalam Soejono Soekanto (2003:24) dengan mengutip pendapat para ahli antara lain :

1) Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah (Mac Iver dan Page).

2) Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Hinton).

3) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Selo Soemardjan)..

Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. Menurut Juliantara (2004: 84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie. 2009:141). Berkaitan dengan proses pembangunan (Solekhan, 2012:20) mengatakan bahwa partisipasi masya

rakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. Lebih dari pada itu, partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk Rusidi dalam Siregar (2001:21).

Menurut Thubany dalam Purnamasari (2006:23) partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri sehari - hari dan representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada (1) pembuatan keputusan, (2) penerapan keputusan, (3) menikmati hasil, dan (4) evaluasi hasil.

Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya oleh penyelenggara pembangunan. Huraerah (2011:79) menyatakan, perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur - unsur penting didalamnya. Kartasmita (1997:49) mengemukakan, perencanaan pembangunan harus memiliki mengetahui serta memperhitungkan unsur pokok dalam pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem

pemerintahannya agar pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan juga peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 54 ayat 1 pengertian Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Santoso dan Gianawati (2005:19), mengemukakan bahwa didalam kegiatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat akan membawa manfaat, yaitu:

- a. Efisien, karena sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan serta pelibatan masyarakat sejak awal membantu perencanaan yang disusun tepat sasaran
- b. Efektif, karena masyarakat lokal lebih memahami kondisi, potensi dan permasalahannya, serta kebutuhannya lebih teridentifikasi
- c. Menjamin kemitraan, karena akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku pembangunan, sehingga dialog dan konsensus akan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama
- d. Memberdayakan kapasitas, terjalinkan lewat upaya negosiasi (dialog) dan pengelolaan pembangunan
- e. Memperluas ruang lingkup, karena masyarakat akan memahami tanggung

jawabnya dan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan f. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, karena akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan

g. Berkelanjutan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan

h. Memberdayakan kelompok marjinal, karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat mengambil peran dalam menentukan kegiatan pembangunan yang tepat untuk mereka

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (Creswell, 2013:4).

Fokus penelitian ini mengenai situasi atau peristiwa yang nyata tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang desa di Desa Pinonobatuan dan teori yang peneliti gunakan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari : 1). Partisipasi dalam memberikan tanggapan informasi 2). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3.) Partisipasi masyarakat dalam operasional pembangunan 4). Partisipasi masyarakat dalam menerima, memelihara hasil pembangunan.

informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Pengurus Karang Taruna
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan yaitu:

Observasi, wawancara dan studi Kepustakaan

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengapa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif proses pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang diukur dengan hasil wawancara.

Berdasarkan teori dari Tangkilisan (2005:32) yang mengemukakan adanya 4 (Empat) tingkatan partisipasi masyarakat dilihat dari:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Tanggapan Informasi

Merupakan peran serta masyarakat dalam menanggapi semua informasi yang berkaitan dengan Musrenbang. Dan juga masyarakat harus tau bagaimana pelaksanaannya memang benar musrenbang itu hanya di perwakilan kepala dusun saja tapi masyarakat harus tau kapan pelaksanaannya. Sebagai konsekuensi dari berlakunya undang-undang Desa, pemerintah desa dituntut untuk melakukan keterbukaan atau transparansi informasi sehingga warga desa memiliki hak atas kendali penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Beberapa pasal dalam undang-undang Desa yang mengatur keterbukaan informasi yaitu dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asa

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan asas ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Merupakan partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan dalam Musrenbang. dari pengamatan semua kegiatan yang dilakukan di desa Pinonobatan bukan saja musyawarah rencana pembangunan tetapi hampir semua kegiatan yang dilakukan di desa diharapkan pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam menanggulangi masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam setiap program rencana pembangunan yang dilakukan di desa agar dapat lebih berjalan dengan baik setiap program kerja yang disusun pada saat musyawarah yang dilakukan, dan saya lihat semua warga desa pinonobatan mau merawat pembangunan yang telah dilaksanakan, tapi ada juga yang belum terlaksanakan atau pembangunan belum selesai.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Operasional Pembangunan

merupakan peran serta masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan dengan ikut bekerja dan bergotong royong dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah desa juga diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengapa harus di usulkannya setiap program kerja yang dipilih atau yang diprioritaskan sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan dapat tertarik untuk aktif dalam musrenbang.

Memang ada sebagian yang masa bodoh bahkan tidak

ingin melibatkan diri dalam program pembangunan desa karena masyarakat tahu ada dana desa dan masyarakat hanya menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang ada sekarang.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Menerima, Memelihara Dan Hasil Pembangunan

Merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan melalui perawatan yang dilakukan secara bersama - sama oleh masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan dalam hal menerima, memelihara dan turut andil dalam merawat pembangunan sehingga setiap rencana pembangunan dapat tersusun dengan baik dan benar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hanya saja pemerintah desa masih belum menyadari bahwa pembangunan balai desa dan terlebih khusus pembuatan jalan itu harus tepat waktu diselesaikan.

Penutup

Kesimpulan

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat sudah maksimal namun perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa walaupun berhadapan dengan

berbagai macam kesibukan maupun rutinitas masyarakat

3. Adanya kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan sudah cukup baik namun di harapkan kepada pemerintah desa agar lebih berupaya lagi untuk menunjukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih berpartisipasi lagi dalam setiap program pembangunan.
4. Masyarakat ikut menerima, memelihara dan turut andil dalam merawat pembangunan. Hanya saja pemerintah desa masih belum menyadari bahwa pembangunan balai desa dan terlebih khusus pembuatan jalan itu harus tepat waktu diselesaikan.

Saran

1. Kepada pemerintah desa di harapkan dapat memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran maupun pendapat guna untuk kemajuan pembangunan desa kedepan.
2. Untuk menggerakkan kemauan masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan perlu diadakan upaya dari pemerintah sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan berpengaruh penting demi tercapainya kebutuhan masyarakat.
3. Menumbuhkan kesadaran diantara masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pembangunan sangat penting sehingga diperlukan kerja sama yang maksimal dari pemerintah. Pemerintah desa juga diharapkan dapat berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan desa.
4. Untuk kepada pemerintah setempat agar dapat menyadari bahwa pentingnya pembangunan desa dan

harus di umumkan supaya masyarakat bisa membantu, agar supaya selesai tepat waktu dan semua ini demi kebaikan kita bersama masyarakat maupun pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama,
- Djohani. Rianingsih dkk. 2008 . Panduan Penyelenggara Musrenbang Desa. Bandung : Studio Driya Media.
- Huraerah, Abu. 2011. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Juliantara (2004) Dadang, Mewujudkan Kabupaten Partisipatif, Pembaruan. Jogjakarta, LAPPERA Pustaka Utama.
- Creswell W. J. 2013, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kartasasmita , Ginanjar , dkk. 2005. Pembaharuan dan Pemberdayaan. Ikatan Alumni ITB
- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum UI. Yogyakarta
- Purnamasari, Dewi. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Universtas Indonesia
- Soekanto, Soejono, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara
- Siregar. I. 2001. Tesis Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Universitas Indonesia, Depok

- Sundarningrum, Sugiyah. 2001. Klasifikasi Partisipasi. Jakarta : Graisindo
- Santoso, Budhy & Gianawati, Nur dyah. 2005. Manajemen Pembangunan Berbasis Masyarakat: Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- Siagian, S. P., 2000. Administrasi Pembangunan. Bina Aks, Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi.s. 2007. Penataan Birokrasi Era Milenium. YPAPI. Yogyakarta.

Sumber lain :

- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republic Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara Jakarta.
- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana kerja pembangunan desa.
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Lembaran RI Tahun 2014. Sekretariat Negara Jakarta.